

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari Bab II sampai Bab IV, penulis dapat mengambil beberapa poin kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Negara dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdul Qadim Zallum

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam Islam, institusi yang memiliki fungsi mengelola keuangan negara dikenal dengan *bayt al-ma'@l*. Dengan kata lain, *bayt al-ma'@l* adalah APBN dalam Islam. Beberapa kesimpulan umum tentang APBN Islam perspektif pemikiran Zallum adalah sebagai berikut:

- a) APBN Islam memiliki format yang unik karena lahir dari paradigma Islam yang khas tentang ekonomi, yaitu pembagian kepemilikan menjadi tiga macam, yaitu kepemilikan negara, kepemilikan umum dan kepemilikan individu.
- b) APBN Islam tidak bertumpu pada pajak dan utang, melainkan bertumpu pada pendapatan dari kepemilikan umum dan negara sebagai sumber pendapatan utama.
- c) Kaidah alokasi anggaran belanja berpijak pada pandangan tentang prioritas pembelanjaan. Prioritas utama belanja negara adalah pada anggaran yang berkaitan dengan tanggung jawab/*ri'ayah* negara terhadap rakyatnya.

2. Pengelolaan Keuangan Negara dalam APBN Indonesia 2010-2012

Dari kajian terhadap APBN Indonesia 2010-2012 penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a) APBN Indonesia bertumpu pada pajak sebagai sumber pendapatan utama. Sedangkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak menyumbangkan kontribusi utama bagi pendapatan negara.
- b) APBN Indonesia senantiasa mengalami defisit anggaran dari tahun ke tahun. Untuk mengatasinya, cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengambil utang baru.

3. Analisis Kesesuaian APBN Islam terhadap APBN Indonesia.

APBN Indonesia jelas tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan Negara dalam Islam. Hal ini dapat dibuktikan dalam dua aspek berikut:

- a) dari sisi paradigma penyusunan APBN.

APBN Indonesia dibuat oleh DPR untuk ditetapkan menjadi UU yang berlaku selama periode satu tahun. Dalam penyusunannya APBN Indonesia tidak terikat dengan ketentuan *syari'ah* dan bercorak kapitalistik. Sedangkan APBN Islam menjadikan *syari'ah* sebagai asas dalam penyusunannya; penetapan jenis-jenis pengeluaran dan pendapatannya; dan kewenangan khalifah dalam pengelolaannya.

- b) dari sisi sumber penerimaan dan pos pengeluaran negara

Dari empat pos paling urgen yang penulis teliti, yaitu (1) pajak; (2) utang; (3) pendapatan dari pemilikan umum dan negara; (4) subsidi, nampak

ketidaksesuaian antara APBN Islam dan APBN Indonesia. Meskipun keempat aspek tersebut terdapat dalam kedua APBN, namun masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa ada alternatif sistem penganggaran yang tidak menjadikan pajak dan utang luar negeri sebagai sumber pendapatan utama dan penyeimbang neraca Negara. Itulah sistem penganggaran Islam. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Negara dalam Islam perspektif pemikiran Abdul Qadim Zallum ini patut diberi perhatian bagi kalangan yang menginginkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat dan Islami.
2. Pengelolaan keuangan negara yang berangkat dari paradigma kapitalistik telah mengakibatkan negara kehilangan pendapatan dari aset-aset umum bagi APBN. Maka sepatutnya Indonesia mengubahnya dengan paradigma Islam, yang menjadikan negara sebagai pengelola tunggal terhadap aset-aset milik umum yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
3. Dengan mengambil paradigma Islam dalam pengelolaan keuangan negara maka Indonesia akan memiliki sumber pendapatan yang besar dari sektor pemilikan umum dan negara. Sehingga negara tidak lagi bersandar pada pajak dan mengakhiri utang luar negeri yang telah membawa dampak yang merusak bagi perekonomian negara.